

ABSTRAKSI

Sengketa dalam masalah pembagian waris disebabkan banyak hal, ada yang karena pembagiannya dirasa tidak adil, ada yang disebabkan karena tidak mengerti hukum yang mengaturnya, bahkan dengan banyaknya hukum waris menyebabkan perbedaan tentang sistem hukum yang digunakan dalam pembagian waris tersebut. Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, karena berebut harta waris hubungan kekeluargaan di antara ahli waris ini bisa rusak atau memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris.

Tesis ini memfokuskan pada permasalahan keabsahan anak angkat dan hak-haknya dalam pembagian waris ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Hasil yang didapat dalam pembahasan ini adalah bahwa pengangkatan Sunardi sebagai anak angkat adalah sah menurut hukum, meskipun pengangkatan anak tersebut tidak dimohonkan penetapan pada pengadilan untuk mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum. Pengangkatan anak dengan mengajukan permohonan dapat dilakukan kapan saja dengan bukti berupa saksi-saksi di persidangan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak dan hasilnya adalah penetapan pengadilan sebagai bukti sah mengenai asal-usul anak tersebut.

Sunardi sebagai anak angkat berhak atas harta peninggalan orang tua angkat menurut Hukum Islam, meskipun dalam KHI pengangkatan anak dibuktikan dengan penetapan pengadilan. Bukti penetapan pengadilan tersebut didasarkan atas niat orang tua angkat mengangkat anak tersebut yaitu untuk memberikan kesejahteraan bukan karena adanya penetapan pengadilan. Sebagai anak angkat maka menurut hukum Islam, mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (3) KHI dari harta peninggalan orang tua angkatnya bukan sebagai ahli waris, karena anak angkat tidak ada hubungan darah dengan pewaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 KHI.

Kata kunci : Kewarisan, anak angkat, wasiat wajibah

ABSTRACT

Disputes within the division of inheritance problems caused by many things, because there are divisions are found to be fair, there is caused because of not understanding the laws that govern, even with the many laws of inheritance led to differences of legal system used in the division of inheritance. Dispute over the division of inheritance disputes could bring harm to heirs abandoned, because the fight over the estate of kinship ties amongst the heirs could damage or sever your ties of kinship among the heirs.

This thesis focuses on the problem of the validity of the adopted child and his or her rights in the distribution of inheritance are reviewed based on Islamic law.

The results obtained in this discussion is that the appointment Sunardi as an adopted child is legally valid, despite the removal of the child is not being applied for the determination of the court to obtain a guarantee of legal certainty. Removal of the child by filing an appeal may be made at any time with the evidence of witnesses at the hearing, the judge will apply for the appointment of a child with a court order issued as a valid proof of the origin of the child.

Sunardi as a foster child has the right to inheritance adoptive parents according to Islamic law, although in KHI adoption evidenced by a court order. Proof of court order was based on the intention of the adoptive parents raise the child's welfare is to give not because of a court order. As an adopted child then according to Islamic law, a testament wajibah as Article 209 paragraph (3) KHI from his adoptive parents inheritance is not as heir, as the adopted child does not have blood relations with the beneficiaries as stipulated in Article 174 KHI.

Key words: Inheritance, foster child, will wajibah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat diselesaikannya karya tulis ilmiah (Tesis) yang berjudul **“Status Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam ”**. Karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Universitas Airlangga.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa di sini patut disampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S., selaku Pembimbing Penulisan dan Anggota Tim Penguji Tesis, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam penulisan tesis ini;
2. Bapak Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H, selaku Ketua Tim Penguji Tesis, sekaligus sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., selaku Anggota Tim Penguji Tesis;
4. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang memberikan kepada penyusun kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang telah bersedia menyisihkan